

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, serta strategis yang menjadikan wilayah ini diperebutkan oleh beberapa negara. Dinamika yang terjadi diakibatkan klaim yang saling tumpang tindih, sehingga di kawasan ini terjadi konflik antara negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina dengan Tiongkok.¹ Klaim Tiongkok atas LTS berdasarkan peta sembilan garis putus-putus melatarbelakangi terjadinya konflik ini, karena dianggap mengancam kedaulatan dari negara-negara yang terlibat.² Klaim tumpang tindih ini sudah meningkatkan risiko adanya konflik terbuka dapat dilihat dari meningkatnya intensitas militerisasi di wilayah tersebut yang kemudian mendorong campur tangan diplomatik dari negara-negara besar yang mendukung prinsip kebebasan.³

Pihak Tiongkok mengklaim secara sepihak bahwa wilayah “sembilan garis putus-putus” atau dikenal *nine-dash line* yang menimbulkan gesekan dengan kepentingan Indonesia.⁴ *Nine-dash line* merupakan garis imajiner yang digunakan Tiongkok untuk mengklaim wilayah LTS sebagai bagian dari hak maritim sosial, garis yang dibuat sepihak oleh Tiongkok yang tidak diatur dalam konvensi hukum

¹ Clive Schofield, *Untangling a Complex Web: Understanding Competing Maritime Claims in the South Tiongkok Sea*, The South Tiongkok Sea Dispute (Cambridge University Press, 2017).

² Schofield, *Untangling a Complex Web: Understanding Competing Maritime Claims in the South Tiongkok Sea*.

³ Robert D. Kaplan and Joanne J. Myers, “Asia’s Cauldron: The South Tiongkok Sea and the End of a Stable Pacific,” *Philippine Political Science Journal* 36, no. 1 (January 2015): 110–12.

⁴ Muhammad Danang Prawira Utama, “Intervensi Negara Ketiga dan Peran Indonesia Bersama ASEAN pada Penyelesaian Isu Laut Cina Selatan (LCS),” *Jurnal Dinamika Global* 4, no. 02 (January 2020): 329–46.

laut PBB 1982 atau (UNCLOS).⁵ Klaim Tiongkok atas wilayah tersebut bertentangan dengan hukum laut internasional yang dirumuskan dalam UNCLOS 1982. UNCLOS merupakan perjanjian internasional yang mengatur ketentuan dalam menentukan garis batas wilayah, hak, serta wewenang antar negara yang berbatasan di wilayah laut. UNCLOS juga menetapkan bahwa garis batas Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut dari garis pantai.⁶

Sebagai pihak yang telah meratifikasi UNCLOS, Indonesia menolak klaim Tiongkok atas sembilan garis putus-putus yang tidak sesuai dengan dasar hukum internasional.⁷ Sengketa antara Indonesia dan Tiongkok di kawasan LTS terjadi pada tahun 2010 berawal dari klaim Tiongkok atas wilayah laut yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.⁸ Posisi Indonesia dalam sengketa LTS ini adalah sebagai *non-claimant state* yang memiliki kepentingan nasional terutama terkait ZEE dan Pulau Natuna yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia.⁹ Meskipun sebagai *non-claimant state*, sengketa ini jika tidak dikelola dengan baik akan memunculkan konflik antar negara yang dapat mengancam keamanan wilayah RI.¹⁰

Pada saat itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespon sengketa tersebut dengan berinisiatif mengadakan lokakarya

⁵ Mangisi Simanjuntak, "Menolak Klaim Historis Tiongkok 'Nine dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan serta Penegakan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,'" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (March 2020): 150–62.

⁶ Robert Beckman, "The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South Tiongkok Sea," *American Journal of International Law* 107, no. 1 (January 2013): 142–63.

⁷ "United Nations Convention on the Law of the Sea," n.d.

⁸ Muhammad Danang Prawira Hutama, "Intervensi Negara Ketiga dan Peran Indonesia Bersama ASEAN pada Penyelesaian Isu Laut Cina Selatan (LCS)."

⁹ Berlian Helmy, "Penguatan 1,5 *Track Diplomacy* guna Meredam Potensi Konflik di Perairan Laut Cina Selatan," *Jurnal Lemhannas RI* 7, no. 4 (August 2020): 3–15.

¹⁰ Kementerian Sekretariat Negara RI, *Sambutan Presiden RI Pada Dialog Membangkitkan Memori Kolektif Kesejahteraan Antar Bangsa*, Setnag.go.id, March 17, 2009, https://www.setnag.go.id/baca/index/sambutan_presiden_ri_pada_dialog_membangkitkan_memori_kolektif_kesejahteraan_antar_bangsa_istana_naga.

pada periode pertama masa kepemimpinannya. Pada periode selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh Indonesia berfokus melalui DoC of Parties in the South Tiongkok Sea (DOC) yang merupakan perjanjian tidak mengikat yang disepakati oleh ASEAN dan Tiongkok.¹¹ Respon-respon Indonesia pada masa pemerintahan Presiden SBY tersebut memperlihatkan orientasi politik luar negeri SBY yang bersifat *outward looking* yang mengedepankan *soft power* dan bercorak *high politics*.¹²

Dengan prinsip “*thousand friends, zero enemy*”, Presiden SBY menyatakan bahwa “tidak ada negara yang menganggap Indonesia sebagai musuh, dan tidak ada negara yang Indonesia anggap sebagai musuh”.¹³ Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa ketika hubungan *people to people* adalah salah satu aktivitas yang menjadi sebuah perhatian bagi Indonesia.¹⁴ Indonesia juga mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan untuk meminimalisir konflik dalam menangani isu LTS.¹⁵

Namun, konflik ini memanaskan pada tahun 2016 ketika kapal-kapal nelayan Tiongkok yang diduga menjaring ikan di Perairan Natuna ditangkap kapal penegak hukum Indonesia yang bersenjata.¹⁶ Pasca peristiwa tersebut, Indonesia

¹¹ R. Wing Witjahyo O. W. Poespojoedho, “Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia Dalam Konflik LAUT TIONGKOK SELATAN Di Era Joko Widodo,” *Jurnal Hubungan Internasional* 12, no. 2 (December 2019): 245–64.

¹² Alsa Yunita Pradina, Nurul Diah Pitaloka, and Renaldi Afriansyah, “Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menghadapi Kasus Natuna dan Kasus Terorisme Global,” *COMTE: Jurnal Sosial Politik dan Humaniora* 01, no. 01 (2023): 176–176.

¹³ Aji Widiatmaja and Ulul Albab, “Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional,” *Politica* 10, no. 1 (Mei 2019): 77–93.

¹⁴ Kementerian Sekretariat Negara RI, *Sambutan Presiden RI Pada Dialog Membangkitkan Memori Kolektif Kesejahteraan Antar Bangsa*.

¹⁵ Rizki Gunawan, *SBY: Indonesia Terdepan Damaikan Konflik LAUT TIONGKOK SELATAN*, Liputan 6, Mei 2014, <https://www.liputan6.com/global/read/2048913/sby-indonesia-terdepan-damaikan-konflik-laut-Tiongkok-selatan>.

¹⁶ Aaron L Connelly, “Indonesia Di Laut Cina Selatan: Berjalan Sendiri,” *Lowy Institute*, April 5, 2017, <https://www.lowyinstitute.org/publications/indonesia-di-laut-cina-selatan-berjalan-sendiri>.

memperketat penjagaan di wilayah Perairan Natuna untuk menahan kapal nelayan Tiongkok yang melakukan *illegal fishing*.¹⁷ Indonesia yang pada saat itu berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan sengketa dengan orientasi politik luar negeri Presiden Joko Widodo lebih bersifat *inward looking*.

Pasca ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok terkait insiden di Perairan Natuna, Presiden Joko Widodo sampai turun langsung mengunjungi Natuna menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Imam Bonjol untuk memberikan pesan kepada Tiongkok bahwa Perairan Natuna adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tentu hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak main-main dalam mengamankan wilayah kedaulatannya.¹⁸ Indonesia juga mengirim nota protes diplomatik kepada Tiongkok terkait klaim yang dianggap melanggar kedaulatan Indonesia sebagai bentuk pernyataan resmi menolak klaim Tiongkok di Natuna.¹⁹

Dalam menghadapi dinamika sengketa LTS, pemerintah Indonesia tidak bergerak secara eksklusif melalui jalur diplomasi resmi antar negara, tetapi juga melibatkan aktor-aktor non-negara yang memainkan peran signifikan dalam memperkuat posisi Indonesia, seperti lembaga *think tank*. Keterlibatan aktor non-negara berfungsi menunjang posisi resmi pemerintah Indonesia. Melalui kontribusi

¹⁷ Resty Woro Yuniar, "LAUT TIONGKOK SELATAN: Kapal-Kapal Tiongkok Diprediksi 'akan Masuk Lagi' Ke Natuna, Indonesia Perlu 'Investasi Di Kapal-Kapal Patroli,'" *BBC News Indonesia*, September 16, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54164982>.

¹⁸ "Tiba Di Natuna, Jokowi Gelar Rapat Di KRI Yang Tembak Kapal Cina," *BBC News Indonesia*, June 23, 2016, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160623_indonesia_jokowi_natuna.

¹⁹ Yashinta Difa Pramudyani, "Nota Protes Tunjukkan Indonesia Tolak Klaim Tiongkok Atas Perairan Natuna," *ANTARA News*, January 4, 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1235631/nota-protes-tunjukkan-indonesia-tolak-klaim-tiongkok-atas-perairan-natuna>.

mereka dalam membentuk opini publik, menyebarkan narasi strategis, serta menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan internasional, aktor-aktor ini turut memperkuat legitimasi klaim Indonesia dalam menghadapi sengketa di kawasan LTS.²⁰

Hingga saat ini, sengketa terbukti berlanjut dengan pemerintah Tiongkok menyatakan siap untuk bernegosiasi dengan Indonesia terkait klaim-klaim tumpang tindih kemaritiman. Kemenlu menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak mempengaruhi kedaulatan atau hak Indonesia di wilayah LTS dan klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum. Ketegangan di LTS menjadi sebuah tantangan yang memerlukan pendekatan dari Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasionalnya.²¹

Berdasarkan latar belakang di atas, dipaparkan bahwa permasalahan LTS ini telah bergulir panjang dan harus ditangani oleh Indonesia secara konsisten. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti diplomasi Indonesia dalam kasus sengketa LTS sebagai pembelajaran mengenai fenomena ini untuk dapat memetakan strategi terbaik yang dapat diambil oleh Indonesia dalam menghadapi sengketa ini.

1.2 Rumusan Masalah

Sengketa LTS diawali dengan perebutan wilayah yang mempunyai nilai penting oleh Tiongkok dan klaim secara sepihak yang membuat Indonesia berupaya untuk mempertahankan kedaulatannya dengan diplomasi. Sebagai negara yang tidak memiliki klaim utama namun berdampak langsung, Indonesia memiliki peran

²⁰ Donald E Weatherbee, "Re-Assessing Indonesia's Role in the South Tiongkok Sea," *Yusuf Ishak Institute* 18, no. 2016 (2016).

²¹ "Presiden Prabowo Janji 'akan Menjaga Kedaulatan' Setelah Pernyataan Bersama Indonesia-Tiongkok Soal LAUT TIONGKOK SELATAN Dianggap Analis Sebagai Blunder Dan Kemunduran," *BBC News Indonesia*, November 13, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gmkn779pno>.

penting dalam menengahi konflik dan mendorong penyelesaian damai melalui jalur diplomasi multilateral. Hal ini menjadi penting, bukan saja karena kepentingan Indonesia, tetapi juga karena konflik tersebut melibatkan 5 dari 10 negara ASEAN, sehingga dapat mempengaruhi stabilitas kawasan. Hal ini menarik untuk diteliti bagaimana Indonesia menggunakan diplomasi dalam menghadapi sengketa LTS.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan rumusan masalah dan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi diplomasi Indonesia dalam menghadapi kasus sengketa LTS?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diplomasi Indonesia dalam menghadapi Sengketa LTS menggunakan konsep *Multi-Track diplomacy* menurut McDonald.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum, khususnya bagi mahasiswa Hubungan Internasional terkait diplomasi multi jalur Indonesia dalam menghadapi sengketa di LTS.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi serta pengetahuan bagi aktor negara pemangku kepentingan nasional dalam mengambil kebijakan terkait diplomasi multi jalur Indonesia dalam menghadapi sengketa di LTS.

1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka pertama yang digunakan sebagai rujukan penelitian ini adalah artikel jurnal berjudul “Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional” oleh Aji Widiatmaja dan Ulul Albab dalam Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik (2019).²² Artikel ini menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia di era SBY cenderung *outward looking* dengan mengedepankan *soft power* dan bercorak *high politics* serta mencoba meningkatkan pengaruh Indonesia di forum global. Sedangkan kebijakan luar negeri Joko Widodo lebih bersifat *inward looking* yang berfokus pada penguatan sektor domestik. Permasalahan akan muncul jika suatu negara tidak berimbang dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Hal ini membuat kerja sama dan keaktifan suatu negara dalam forum internasional menjadi penting. Hal tersebut berupa mengembalikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN guna membuat ASEAN sebagai *zone of peace, freedom, and neutrality* (ZOPFAN), mencegah masuknya kekuatan asing, menjaga kedaulatan negara-negara ASEAN, serta mengurangi sikap pragmatis dan unilateralis dalam merespon perubahan lingkungan strategis. Secara sederhana, kebijakan *outward looking* digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional yang memberi keuntungan pada rakyat Indonesia (*inward looking*).

Studi pustaka kedua, artikel jurnal berjudul “Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Kasus Natuna dan Kasus Terorisme Global” oleh Alsa Yunita Pradina, Nurul Diah Pitaloka, Renaldi Afriansyah dalam Jurnal COMTE Sosial

²² Widiatmaja and Albab, “Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional.”

Politik dan Humaniora (2023).²³ Artikel ini menjelaskan membahas kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi isu-isu global seperti konflik di Natuna dan ancaman terorisme, serta menyoroti pendekatan diplomasi Indonesia di era Presiden Joko Widodo yang berfokus pada kepentingan dalam negeri dan stabilitas nasional. Kebijakan luar negeri milik presiden Joko Widodo yaitu *Down to Earth Diplomacy* terlihat memiliki visi dan misi yang sama dengan kebijakan luar negeri milik presiden sebelumnya (Susilo Bambang Yudhoyono) yaitu diplomasi dengan jargon seribu kawan dan nol musuh. Penulis juga menyatakan bahwa latar belakang dari kedua presiden ini menjadi pembeda yang menonjol dari diambilnya dua kebijakan luar negeri ini. Dimana SBY dengan latar belakang militernya lebih mementingkan dampak luar (*outward looking*) Sedangkan presiden Jokowi yang condong terhadap dampak masyarakat (*inward looking*) dimana kebijakan ini berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat dengan cara yang cepat dan efektif.

Studi pustaka ketiga, artikel jurnal berjudul “Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan ASEAN Dalam Upaya Penyelesaian Konflik LTS” oleh R. Wildan Pratama Indra Kusumah, Nana Supriatna, Yani Kusmarni dalam jurnal FACTUM (2018).²⁴ Jurnal ini menyebutkan perbedaan pandangan di antara Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN terkait upaya penyelesaian sengketa di LTS mengakibatkan sulitnya konflik tersebut untuk diselesaikan. Tiongkok menganggap konflik yang terjadi tersebut bukan urusan ASEAN sehingga dalam penyelesaiannya pun ASEAN tidak berhak ikut campur. Tiongkok

²³ Pradina, Pitaloka, and Afriansyah, “Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menghadapi Kasus Natuna dan Kasus Terorisme Global.”

²⁴ R. Wildan Pratama Indra Kusumah, Nana Supriatna, and Yani Kusmarni, “Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan ASEAN Dalam Upaya Penyelesaian Konflik LAUT TIONGKOK SELATAN,” *FACTUM* 7, no. 2 (Oktober 2018).

menegaskan bahwa hubungannya dengan ASEAN hanya sebatas hubungan kerja sama dalam hal ekonomi dan bidang-bidang lainnya yang menguntungkan. Tiongkok juga memastikan bahwa konflik LTS tidak akan berpengaruh terhadap hubungan kerja sama tersebut. Tiongkok akan menyelesaikan sengketa dengan masing-masing negara melalui hubungan bilateral dengan negara-negara terkait. Disisi lain, negara-negara anggota ASEAN yang tergolong ke dalam *claimant states* berharap ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat menjadi jembatan untuk penyelesaian konflik yang terjadi karena hal tersebut sejalan dengan tujuan ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan.

Studi pustaka keempat, artikel jurnal yang berjudul “Strategi Indonesia dalam Merespons Kebangkitan Tiongkok pada Masa Kepemimpinan Presiden SBY (Studi Kasus: Konflik LTS)” oleh Apriwan, Poppy Irawan, dan Sofia Trisni dalam *Andalas Journal of Internasional Studies* (2016).²⁵ Penulis menjabarkan bahwa masa SBY Indonesia memiliki citra positif di mata negara lain, dengan sengketa LTS masa SBY dapat dipastikan bahwa Indonesia tidak ingin terjadi penyelesaian konflik dengan kekerasan. Panduan pada CoC akan memandu setiap negara yang berkonflik untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan damai. Tidak dapat dipungkiri bahwa SBY menjadikan ASEAN posisi yang penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia, maka setiap permasalahan yang terjadi di kawasan menjadi kepedulian Indonesia akan selalu menggunakan ASEAN dalam penyelesaiannya. Indonesia sudah dianggap sebagai pengaruh besar dalam menjaga keutuhan

²⁵ Sofia Trisni, Apriwan Apriwan, and Poppy Irawan, “Strategi Indonesia dalam Merespon Kebangkitan Tiongkok pada Masa Kepemimpinan Presiden SBY (Studi Kasus: Konflik LAUT TIONGKOK SELATAN),” *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 5, no. 2 (November 2016): 129.

ASEAN, sehingga siapa pun pemimpin ASEAN akan berharap lebih kepada Indonesia karena persepsi Indonesia sebagai *natural leader* ASEAN.

Studi pustaka terakhir, artikel jurnal yang berjudul “Indonesia’s Responses toward the South Tiongkok Sea Dispute During Joko Widodo’s Administration” oleh Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Ika Sari dalam jurnal *Politica* (2021).²⁶ Penulis mengatakan strategi diplomasi masa Presiden Joko Widodo dengan mengirim nota protes kepada pemerintah Tiongkok tahun 2016, 2019, dan 2020 akibat adanya pelanggaran kegiatan *IUU fishing* oleh kapal nelayan dan pelanggaran kedaulatan *coast guard* Tiongkok di perairan Natuna, namun pihak Tiongkok menyanggahnya dan menyatakan bahwa Tiongkok mempunyai hak secara historis dan berdaulat atas perairan di LTS. Indonesia berusaha memperkuat posisinya dengan mengembangkan Kepulauan Natuna dari sisi pembangunan ekonomi dan manusia, Presiden Joko Widodo membagikan 102 sertifikat lahan kepada warga Natuna sebagai bukti lahan tanah yang menjadi milik masyarakat Natuna dan 470 nelayan berlayar meramaikan perairan Natuna. Dengan adanya aktivitas di Laut Natuna Utara, maka diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjadi poin penting yang menandai kehadiran Indonesia di wilayah serta menegaskan bahwa Natuna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia.

Penulis juga mengatakan bahwa di masa pemerintahan Joko Widodo, pendekatan Indonesia terhadap sengketa LTS mulai bergeser untuk bisa lebih fokus terhadap kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasionalnya di Natuna.

²⁶ Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, and Marina Ika Sari, “Respons Indonesia Terhadap Sengketa LAUT TIONGKOK SELATAN Semasa Pemerintahan Joko Widodo,” *Politica* 12, no. 1 (May 2021): 85–102.

Penulis melihat bahwa belakangan ini yang menjadi tegas dan mengedepankan kehadiran fisik adalah kekuatan militer Indonesia di Natuna. Terbukti dengan adanya peningkatan gelar kekuatan militer di Natuna berupa penyiagaan personel TNI untuk melakukan patroli dan menjaga keamanan ZEE di perairan Natuna secara lebih intensif.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Multi-Track Diplomacy*

Multi Track Diplomacy merupakan perkembangan bentuk diplomasi kuno yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai diplomat dan juga pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Melalui penjabaran tulisan Joseph Montville berkaitan dengan distingsi tindakan resmi pemerintah menjadi jalur pertama dan upaya yang tidak resmi atau non-pemerintah menjadi jalur kedua dalam penyelesaian konflik di tahun 1981, merupakan dasar kemunculan konsep *Multi-Track Diplomacy*.²⁷ Secara umum, *Multi-Track Diplomacy* merupakan sebuah kerangka konseptual dalam memandang proses perdamaian di dunia internasional. *Multi-Track Diplomacy* membawa pandangan bahwa proses terjadinya sebuah perdamaian dalam sistem internasional dapat dilakukan melalui adanya kombinasi antara diplomasi pemerintah, kelompok, dan individu.

Dengan mempunyai tujuan utama menciptakan perdamaian dunia serta membangun perdamaian yang saling terintegrasi, *Multi-Track Diplomacy* menggunakan *soft power* dari pelaksanaan *soft diplomacy* melalui pembangunan hubungan kerja sama dengan negara lain. Bagi setiap negara, dengan keberadaan diplomasi bertujuan untuk melindungi kebebasan politik serta integritas

²⁷ C.P.F Luhulima, "Pendekatan *Multi-Track* Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan: Upaya Dan Tantangan," *GLOBAL* 9, no. 1 (Mei 2007): 75–85.

teritorialnya. Mempunyai tujuan yang dapat dicapai melalui hubungan yang kuat dengan negara-negara bersekutu, juga menetralkan negara-negara yang bermusuhan. Dalam praktiknya, diplomasi tidak hanya dilakukan antar negara, tetapi semua subjek hubungan internasional yang tercerminkan dalam konsep *Multi-Track Diplomacy* sebagai salah satu sistem dalam perdamaian.²⁸

Istilah *Multi-Track Diplomacy* diciptakan dan dikembangkan lebih jauh oleh Louise Diamond dan John W. McDonald yang memperluas jalur yang pada awalnya hanya dua jalur menjadi sembilan jalur. Sembilan jalur dalam implementasi *Multi-Track Diplomacy* tersebut, antara lain:²⁹

Track One Pemerintah, berkontribusi dalam menyelesaikan konflik dengan cara berdiplomasi melalui forum diplomasi resmi, pembuatan peraturan sebuah kebijakan dan kesepakatan serta upaya perdamaian dengan perwujudan melalui kegiatan formal dan bersifat prosesi pemerintahan.

Track Two Non-Pemerintah, upaya perdamaian melalui resolusi konflik. Ranah aksi non-pemerintah profesional yang berusaha menganalisis, mencegah, menyelesaikan, dan mengelola konflik internasional oleh aktor-aktor negara.

Track Three Bisnis mengupayakan perdamaian dengan melakukan kegiatan perdagangan. Bisnis berperan dalam mengupayakan perdamaian melalui pembangunan perdamaian itu sendiri dengan cara menyediakan kesempatan dan peluang terhadap kegiatan ekonomi. Mewujudkannya melalui kerjasama internasional berupa perjanjian investasi, hubungan dagang, kemitraan, dan forum

²⁸ John W. McDonald, "The Institute for *Multi-Track Diplomacy*," *Journal of Conflictology* 3, no. 2 (December 2012).

²⁹ Mahyar Diani, "Strategi *Multi Track Diplomacy* Dalam Kerjasama Ekonomi Industri Korea Selatan (ROK) Terhadap Indonesia Tahun 2006-2012" (UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

komunikasi informal sebagai bentuk dukungan untuk pembuatan kegiatan perdamaian.

Track Four Masyarakat sipil, upaya perdamaian melalui keterlibatan pribadi.

Jalur ini mencakup berbagai cara agar setiap warga negara dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan perdamaian dan pembangunan melalui diplomasi warga negara, program pertukaran, organisasi sukarela swasta yang sesuai dengan minat, organisasi non pemerintah, dan kelompok dengan permintaan khusus.

Track Five Lembaga Penelitian Pelatihan dan Pendidikan terbagi menjadi tiga dan terhubung satu dengan yang lain dengan program universitas sebagaimana program kegiatan pelatihan diisi dengan kegiatan berupa pelatihan keterampilan dalam bernegosiasi, mediasi, resolusi konflik serta wadah untuk pihak ketiga.

Track Six Aktivis perdamaian Aktivisme atau upaya perdamaian melalui Advokasi. Jalur ini mencakup bidang perdamaian dan aktivisme lingkungan tentang isu-isu seperti pelucutan senjata, hak asasi manusia, keadilan sosial dan ekonomi, dan advokasi kelompok-kelompok berkepentingan khusus mengenai kebijakan pemerintah yang spesifik.

Track Seven Lembaga dan Kelompok Keagamaan, upaya perdamaian melalui aksi keagamaan, jalur ini mengkaji keyakinan dan Tindakan damai dari komunitas spiritual, agama, dan gerakan berbasis moralitas seperti pasifisme, perlindungan, dan non-kekerasan.

Track Eight Pendonor Dana, upaya perdamaian melalui penyediaan sumber daya yang merujuk pada komunitas pendanaan yayasan dan individual yang memberikan dukungan finansial untuk banyak kegiatan yang dilakukan oleh jalur lain.

Track Nine Media dan Komunikasi, berisi upaya perdamaian melalui informasi dan ini adalah ranah suara rakyat yang meliputi bagaimana opini publik dibentuk dan diekspresikan oleh media-cetak, film, video, radio, sistem elektronik, dan seni.

Pada dasarnya, *Multi-Track Diplomacy* berhubungan erat dengan proses dilakukannya perdamaian. Dalam kaitannya *Multi-Track Diplomacy* berupaya dalam menjaga perdamaian tidak hanya berarti serangkaian tindakan untuk mencapai perdamaian di antara pihak-pihak yang saling bertentangan, tetapi juga serangkaian tindakan untuk bisa mencegah, mengelola, dan menyelesaikan sebuah konflik. Untuk memberikan pemahaman tentang konsep *Multi-Track* yang menjadi fokus penelitian ini, tabel berikut menampilkan taksonomi *Multi-Track diplomacy* berdasarkan model McDonald yang telah disesuaikan dengan konteks diplomasi Indonesia dalam sengketa LTS.

Tabel 1.1 Taksonomi *Multi-Track Diplomacy* McDonald

Multi Track <i>Diplomacy</i>	Aktor	Aspek
<i>Track One</i>	Pemerintah, diplomat, dan aktor resmi negara	Mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial stabilitas kawasan, dan pembuatan kebijakan formal, negosiasi antar negara.
<i>Track Two</i>	Aktor Non- Government	Keterlibatan kelompok yang kemudian dapat menentukan keinginan dari setiap pihak yang bertikai sehingga memudahkan mencari solusi dan memprediksi permasalahan.

<i>Track Three</i>	Ekonomi Investor	Menjaga jalur perdamaian melalui perdagangan dan investasi menunjukkan kehadiran ekonomi negara.
<i>Track Four</i>	Individu, organisasi kepentingan khusus	Perdamaian melalui keterlibatan pribadi dan pembangunan.
<i>Track Five</i>	Pendidik, peneliti	Perdamaian melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian.
<i>Track Six</i>	Aktivis advokasi sosial dan HAM	Perdamaian melalui advokasi sosial dan HAM.
<i>Track Seven</i>	Komunitas agama dan spiritual	Perdamaian melalui sebuah komunitas religius dan moralitas.
<i>Track Eight</i>	Yayasan, penyediaan dana	Dukungan finansial untuk menjalin sebuah perdamaian.
<i>Track Nine</i>	Media massa, komunikator	Pembentukan sebuah opini publik dan penyebaran sebuah informasi.

Sumber : (John W.Mc Donald)³⁰ dan diolah kembali oleh peneliti

Penelitian menggunakan taksonomi *Multi-Track Diplomacy* dikarenakan dapat membantu penelitian dalam menganalisis bentuk dan strategi Indonesia dalam menyelesaikan konflik sengketa LTS, taksonomi ini dapat memberikan penjelasan sistematis mengenai apa saja yang dilakukan Indonesia dalam kasus sengketa LTS melalui diplomasi Indonesia.

³⁰ McDonald, "The Institute for *Multi-Track Diplomacy*."

1.8 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian untuk membantu peneliti dalam menemukan jawaban pertanyaan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut.

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan sebuah jenis penelitian yang memperoleh hasil tanpa menggunakan teknik kuantifikasi atau statistik, fokus terhadap informan yang bisa diamati.³¹ Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif, yang dalam hal ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana diplomasi *Multi-Jalur* Indonesia dalam menghadapi sengketa LTS.

1.8.2 Batasan Penelitian

Peneliti menentukan batas penelitian agar penelitian ini mempunyai fokus yang jelas dan tidak meluas dari apa yang sudah dirumuskan, peneliti memberikan batasan penelitian berdasarkan dua aspek, yaitu batasan waktu dan batasan fenomena yang akan dikaji. Batasan fenomena atau isu penelitian ini adalah diplomasi Indonesia dalam menghadapi sengketa LTS, sementara batasan waktu yang dipilih oleh peneliti adalah sejak diplomasi Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo 2016-2020.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Dalam penelitian ini konsep unit analisis dimaknai sebagai objek yang akan dianalisis dalam penelitian sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini, unit analisis yang dijadikan sebagai fokus utama kajian ialah diplomasi *Multi-Track*

³¹ Agustini, Aully Grashinta, and San Putra, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif* (PT Mifandi Mandiri Digital, 2023).

Indonesia. Sementara itu, unit eksplanasi dinamai sebagai fenomena atau masalah yang mempengaruhi perilaku dari unit analisis yang akan digunakan dalam penelitian atau disebut sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini unit eksplanasi yang mempengaruhi unit analisa adalah konflik sengketa LTS terhadap Indonesia.

Selanjutnya, untuk tingkat atau level analisis dimaknai dengan posisi dari unit yang akan menjadi objek penelitian baik secara individu, kelompok, negara, sistem internasional, maupun regional. Dikarenakan keinginan peneliti untuk mendapatkan pemahaman lebih luas tentang diplomasi *Multi-Track* yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi sengketa LTS.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lebih tepatnya melalui studi pustaka. Sumber data didapatkan dari pengumpulan jurnal, dokumen, buku, laporan, situs terpercaya serta sumber lain yang tervalidasi untuk menunjang data terkait. Data dicari pada laman Google Scholar dengan penggunaan kata kunci “Diplomasi” AND “Indonesia” AND “Konflik LTS” AND “Joko Widodo” AND “Nine-Dash Line”. Ahli yang menekankan pentingnya penggunaan kata kunci yang efektif dalam pencarian literatur adalah John W. Creswell. Dalam sebuah diskusi tentang metodologi pencarian literatur, Creswell menyoroti pentingnya mengidentifikasi kata kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencarian literatur.³²

³² John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fifth Edition (London: SAGE Publication, 2017).

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisis data secara terperinci. Data sekunder yang sebelumnya telah didapatkan oleh peneliti dari studi pustaka, terutama jurnal, berita, dan laporan terkait, kemudian peneliti olah dengan teknik analisis data yakni *data reduction*, *data display*, *drawing/verificasion*, hingga *conclusion* terhadap hal-hal yang penting sesuai dengan penelitian.³³ *Data reduction* memilih dan memfokuskan hal-hal yang penting sesuai dengana penelitian; *data display* yakni penyajian data yang telah terorganisasikan sehingga mudah untuk dipahami; dan yang terakhir *drawing/verification* ,*conclusion* yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1.8.5.1 Data reduction

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah yang diperoleh selama penelitian. Proses ini penting untuk mengelola kompleksitas data kualitatif dan memastikan data tetap relevan dengan pertanyaan penelitian. Dengan membatasi tahun 2015-2019, terdapat lebih dari 663 artikel jurnal terkait topik penelitian ini. Dari jumlah tersebut, peneliti mempersempit pilihan dengan menggunakan kode atau kata kunci seperti "Diplomasi", "Indonesia", "Konflik LTS", "Joko Widodo", dan "*Nine-dash line*", sehingga tersisa 46 sumber yang akan dijadikan referensi literatur.

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

1.8.5.2 Data display

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan kerangka konseptual *Multi-Track diplomacy* dari McDonald, yang berhubungan dengan diplomasi Indonesia dalam menangani konflik sengketa LTS dengan Tiongkok. Melalui proses *Open Coding* dan *Axial coding*, penyajian data dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana Indonesia menjalankan diplomasi terhadap Tiongkok dalam menghadapi sengketa tersebut berdasarkan berbagai *Track* yang ada.

1.8.5.3 Conclusion drawing/verification

Penarikan kesimpulan mencakup interpretasi data yang sudah dianalisis untuk menghasilkan pemahaman dan memvalidasi temuan dengan data asli yang dikumpulkan. Proses ini menjamin bahwa kesimpulan yang dibuat didukung oleh bukti empiris. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan akan menggambarkan bagaimana diplomasi Indonesia terhadap Tiongkok dalam menangani konflik sengketa LTS.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang dari topik penelitian, memfokuskan kepada urgensi mengapa topik ini perlu atau menarik untuk dibahas menjadi sebuah penelitian. Pada bab ini, juga meninjau dua gaya kebijakan kepemimpinan Presiden SBY dan Presiden Jokowi, dan peneliti akan berfokus pada strategi kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Selanjutnya, bab ini terdapat rumusan masalah sebagai bentuk penyederhanaan dari latar belakang, pertanyaan penelitian yang akan dijawab

dalam penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian, serta manfaat penelitian yang diharapkan dengan adanya penelitian ini.

BAB II Konflik Laut Tiongkok Selatan

Bab ini akan menjelaskan secara khusus awal mula konflik sengketa LTS dan klaim sepihak melalui *nine-dash line* menimbulkan ketegangan dan berujung pada serangkaian insiden maritim yang sampai saat ini belum menemukan titik terang. Bab ini menguraikan aktor yang terlibat, serta implikasi geopolitik dari sengketa LTS terhadap stabilitas kawasan dan kepentingan negara.

BAB III Indonesia di Laut Tiongkok Selatan

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana diplomasi Indonesia yang diambil oleh Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia disaat Indonesia memiliki berbagai kepentingan nasional yang perlu dijaga dari kedaulatan wilayah, keamanan maritim kawasan. Bab ini akan membahas berbagai kepentingan Indonesia di LTS, serta bagaimana kepentingan tersebut membentuk sebuah strategi diplomasi Indonesia dalam menghadapi sengketa yang berlangsung di kawasan tersebut.

BAB IV Analisis *Multi-Track Diplomacy* Indonesia Dalam Kasus Laut Tiongkok Selatan

Bab ini akan berisikan analisis diplomasi *Multi*-jalur Indonesia dalam menghadapi sengketa LTS terkait klaim wilayah, dan melihat bagaimana strategi orientasi pemerintah masa Presiden Joko Widodo. Diplomasi *Multi-Track* mencakup keterlibatan aktor non-negara yang turut memainkan peran dalam membangun pemahaman, kerja sama, dan kepercayaan di antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa.

BAB V Penutup

Bab ini akan memuat sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan ini berisikan inti sari dari pembahasan bab-bab sebelumnya, yang kemudian diharapkan akan menunjukkan diplomasi *Multi-jalur* yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi sengketa LTS di Natuna.

